

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN THAILAND DI BIDANG PERTANIAN TAHUN 2010-2014 (STUDI KASUS PENINGKATAN KUALITAS BERAS)

Kenedy Boy L¹
Nim. 1002045019

Abstract

The problem of rice commodities in Indonesia is very complex starting from government policies that affect the private sector and farmers, some of them are: the lack of budgets of the agricultural sector, the development that is touched in the industrial sector, the transfer of rice fields, the increasing population, rice production centers the uneven and agricultural technology that still directly corners the farmers in the midst of incessant government programs to surplus rice to bring consequences to the decline in grain prices at the farmers' level of cruel disincentives for farmers to improve rice productivity and management of food and food reserves. Implementation Cooperation between Indonesia and Thailand in agriculture year 2010-2014 (case study of rice quality improvement). This research uses qualitative research method. In this study the authors use the concept of bilateral cooperation and food security used to perform analysis in this study. Data analysis technique used is qualitative analysis. The implementation of cooperation by Indonesia and Thailand in agriculture is a case study of improving the quality of rice in the form of agricultural organizations as an effort to improve the quality of rice in Indonesia and the development of agricultural research. and extension in Indonesia The purpose of this research is to know the result of Implementation between Indonesia and Thailand hence the result of bilateral agreement the Indonesian government uses two ways to realize the improvement of rice quality. On the one hand, the government encourages farmers to increase their production by encouraging technological innovation and provision of subsidized fertilizers and promoting the consumption of other staple foods. And Tackling the victims of agriculture and regenerating farmers to the implementation of agrarian up to the development of agribusiness populist.

Keywords: *implementation, Indonesia-Thailand, Rice Quality Improvement*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan yang luas dan mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya dengan sumber daya alam. Hal ini membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya yaitu pangan, papan, sandang namun dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah pangan. Rendahnya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kboy.17682gmail.com

kualitas dan kurangnya ketersediaan pangan akan membuat bencana kelaparan, penyakit dan menurunnya kesejahteraan hidup. Maka dari itu Tanggung jawab negara adalah menjamin ketersediaan pangan karena salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada tanggungjawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan dapat menjamin keberlanjutannya.

Seiring dengan itu, diperlukan kesiapan dalam mewujudkan ketahanan pangan (*food security*), kemandirian pangan (*food self-help*), dan kedaulatan pangan salah satunya yaitu melakukan kerjasama dengan negara sahabat, contohnya Thailand dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak krisis pangan yang akan terjadi di masa *souverenity*), di dalam skala nasional. Pangan yang utama di Indonesia adalah beras. Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah ketahanan pangan menjadi isu penting di Indonesia, dan dalam setahun belakangan ini dunia juga mulai dilanda krisis pangan. Menurut Sunday Herald (12/3/2008), krisis pangan kali ini menjadi krisis global terbesar abad ke-21, yang menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia.⁽²⁾*Asian Development Bank*, 9 april 2017 (ADB).

Berbagai upaya telah dilakukan adanya cara untuk mengatasi setiap permasalahan dalam mencegah suatu tantangan tersebut. Implementasi di negara kita akan selalu dihadapkan pada krisis pangan yang terus menerus. Suatu keadaan dimana jumlah produksi pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hingga saat ini, saat ini ketahanan pangan (*food security*) tampaknya mengkhawatirkan dikarenakan sejak awal tahun 1990-an jumlah produksi pangan terutama beras, cenderung mengalami penurunan sehingga dalam 15 tahun terakhir hampir setiap tahun Indonesia harus mengimpor beras. Disamping itu, harga beras pun naik turun. Meski tampak ada spekulasi dalam fluktuasi harga bagaimanapun fluktuasi harga itu terkait juga dengan fluktuasi persediaan beras di pasaran. Tampaknya kini Indonesia sudah tidak memiliki ketahanan pangan yang berasal dari kekuatan produksi pertanian dalam negeri, tetapi bentuk "Ketahanan Pangan yang Tergantung".⁽³⁾<http://repository.usu.ac.id/pdf>. diakses tanggal 09 April 2014)

Tulisan ini akan menjelaskan Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia dan Thailand di Bidang Pertanian Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Beras)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kerjasama Bilateral

Dalam hubungan antar negara secara global pentingnya hubungan kerjasama sangat diperlukan, terutama dalam mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara.

a. Menurut Howard Letner Kerjasama adalah:

Suatu kondisi atau keadaan dimana negara-negara yang akan berinteraksi mengikuti kebijakan yang bersekongkol atau sejalan dalam mengusahakan tujuan bersama atau keuntungan bersama. Adapun jenis kerjasama tersebut dapat di bagi jadi tiga macam, yaitu: kerjasama regional, kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral.⁽⁴⁾ (*eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013, 1 (2): 119-128 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013 kerjasama united state environmental protection agency (us-epa) – Indonesia dalam

peningkatankualitas udara & kesehatan publik(studi kasus program breathe easy jakarta)tazrian juniarto saputra1nim. 0702045167, hal 4).

b. Kerjasama bilateral

Adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, hubungan bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, baik itu kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan serta keamanan. Konsep ini dijelaskan bahwa hubungan bilateral itu menyangkut interaksi antara dua negara. Dimana masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang samasehingga terjadi suatu kerjasama. Konsep hubungan bilateral juga dijelaskan oleh Graham Evans dan Jeffrey Newham, dimana hubungan bilateral adalah:

Menyangkut masalah-masalah yang mempengaruhi dua kelompok yang berbeda dengan unilateral (satu kelompok) dan banyak kelompok (multilateral). Hubungan bilateral di pergunakan dalam masalah-masalah, internasional untuk mengidentifikasi sesuatu masalah tetap dilakukan secara eksklusif menyangkut masalah-masalah perdagangan, pertahanan dan diplomasi.⁵(*Skripsi: Hestie Dwi Mandasari, Nim 03.378737.05135.02 peluang dan kendala kerjasama bilateral indonesia-jepang dalam kerangka kerjasama economic partnership agreement (epa) halman 18-21. (Tidak Dipublikasikan)*).

Dalam kosep yang di kemukakan oleh Graham Evans dan Jeffrey Newhan ini menjelaskan, bahwa hubungan bilateral ini tidak hanya menyangkut, interaksi antara dua negara, tetapi lebih spesifik lagi bahwa hubungan bilateral juga menyangkut hubungan antar kelompok yang saling berkepentingan. Dimana di dalamnya ada pengidentifikasian suatu masalah yang dianggap menjadi permasalahan Internasional atau Global sehingga dalam penaganannya di perlukan hubungan bilateral.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih baik ketimbang bersikap konfrontatif dengan negara tersebut. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. Didalam hubungan internasional hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan. Menurut Kusumohamidjoyo hubungan bilateral diartikan Suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.⁶(*Kusumohamidjoyo, 13http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral. Diakses 5september 2015*).

Jadi, dalam kerjasama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. Perkembangan yang menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak

geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang.

Dilaksanakannya kerjasama bilateral antar dua negara dirasakan akan sangat penting artinya, oleh karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan negara lain. Pemanfaatan modal dasar berupa SDA (Sumber Daya Alam) dalam pencapaian tujuan dan kepentingan nasional itu mutlak dilakukan, namun keterbatasan akibat perbedaan letak geografis, keadaan iklim dan luas wilayah negara tidak dapat dihindari. Inilah yang disebut sebagai "endowment factor" yang lebih merupakan anugerah Tuhan terhadap negara tersebut.

Suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain akan mengacu pada kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Terdapat negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, sementara di pihak lain ada negara yang miskin akan sumber daya alam namun memiliki kemampuan teknologi untuk mengolahnya, dengan adanya perbedaan tersebut maka kemungkinan untuk berinteraksi dalam kerangka kerjasama sangat besar dimana hasil kerjasama tersebut akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan bangsa negara itu.

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Dalam kamus politik internasional, hubungan bilateral secara sederhana dijelaskan sebagai keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)".

Batasan seperti ini mengandung maksud bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan. Istilah bilateral atau hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara geografis seperti yang dikemukakan oleh Kusumahamidjojo tentang hubungan bilateral sebagai berikut; Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama: tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua: setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.⁷ (*Makalah dipersiapkan untuk Kongres ISEI, Mataram, 2008*). Pada level nasional pengertian ketahanan pangan telah menjadi perdebatan selama tahun 1970 sampai tahun 1980an. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan. (⁸*Lassa Jonnatan. Politik ketahanan Pangan Indonesia, 2006*) Stevens et al. (2000), dalam Lassa memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan Bostwana, sebagai misal, sebagai negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada self-reliance. yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan import terhadap ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti dan akademisi menyadari bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya).

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagaimana bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu.

Maxwell dan Frankenberger menyatakan: “jaminan akses setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI pada tahun 1999 diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan.

(⁹<http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf>, diakses 20/11/2013)

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Ketersediaan pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dalam hal ini lebih sering dilihat secara makro. Artinya jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap telah cukup.

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang ketahanan pangan pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.²(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Tentang Ketahanan Pangan).

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya. Peningkatan produksi pangan oleh

masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah wajib mengupayakan adanya jaminan akses pangan, agar mereka senantiasa terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Arah Kebijakan

Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir terkait dengan pertumbuhan permintaan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan-nya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh kompetisi pemanfaatan lahan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat di atasi maka kebutuhan terhadap pangan impor akan semakin tinggi. Ketergantungan pangan impor yang tinggi, dapat menimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi secara negatif terhadap kedaulatan nasional.

Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun sementara saja (transien). Jika kondisi yang mereka alami berkelanjutan maka kualitas fisik maupun faktor intelegensia masyarakat tersebut cenderung rendah, dan bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya (SDM).

Pada sisi lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang senantiasa didayagunakan melalui proses pembangunan menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage). Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kuat yaitu pada sumberdaya domestik, serta memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan salah satu prioritas yang strategis dalam pembangunan nasional.

Memperhatikan permasalahan dan potensi sebagaimana didiskusikan di muka maka pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan

bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu, melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air;
2. menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri;
3. mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan
4. meningkatkan kapasitas produksi secara nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

(a) mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antardaerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di perdesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya).

b. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/nasional, sebagai berikut:

1. Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari;
2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (beras-berasan 275 gram, umbi-umbian 100 gram, pangan hewani 150 gram, kacang-kacangan 35 gram, sayur dan buah 250 gram);
4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat;
5. Mengurangi jumlah/persentase penduduk rawan pangan kronis (yang mengonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1 persen

- per tahun; termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan kurang gizi;
6. Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010; serta meminimalkan impor pangan utama yaitu lebih rendah 10% dari kebutuhan nasional;
 7. Meningkatkan rasio lahan per orang (landman ratio) melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta ha, dan lahan kering minimal 15 juta ha;
 8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah;
 9. Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan ke seluruh daerah;
 10. Meningkatkan kemampuan nasional dalam mengenali, mengantisipasi dan menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

c. Sistem Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan merata, (c) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (d) status gizi masyarakat³. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan ditingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.

Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Millennium Development Goals (MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan ketahanan

pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

d. Strategi Umum

Berdasarkan arahan dan tujuan tersebut, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah strategi jalur ganda (*twin-track strategy*), yaitu: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (b) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan menggerakkan seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, serta pelaku usaha, untuk melaksanakan aktivitas ekonominya secara efisien dan bertanggungjawab, melaksanakan kewajiban sosialnya serta, membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, golongan usia lanjut dan cacat ganda.

e. Akses pangan (*food access*)

Kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggambarkan pertn Indonesia dan menganalisis implementasi kerj sm pemerintah Indonesia dn thiland mengunjungi Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu implementasi Kerjasama Indoensiadn Thiland di bidng pertanian (Studi Ksus Peningktn Kualitas bers 2010-2014)

Hasil Penelitian

Thailand merupakan salah satu dari negara asia tenggarayang mempunyai pertanian yang maju ,Indonesia patut belajar dri negara tersebut. SebabBerdasarkan hasil dari kesepakatan kerjasamabilteralantara indonesia dan thiland di bentuklah orgnisasi JAWG segi gin dari implementasi dari kerja sama tersebut Pemerintah Indonesia menggunakan dua cara untuk mencapai swasembada beras. Pada satu sisi, pemerintah mendorong para petani untuk meningkatkan produksi mereka dengan mendorong

inovasi teknologi dan menyediakan pupuk bersubsidi serta mempromosikan konsumsi makanan-makanan pokok lainnya.

Bentuk kebijakan dari kerjasama dalam MoU pasal 3 dijelaskan bahwa bidang kerjasama yang luas meliputi:

1. Promosi perdagangan pertanian;
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati pertanian dan konservasi;
3. Studi kerjasama, pengembangan penelitian dan penyuluhan pertanian;
4. Kerjasama teknis dan bantuan untuk pembangunan kapasitas di pertanian pengembangan;
5. Lahan pertanian dan pengelolaan air dan konservasi;
6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam internasional yang relevan dan organisasi regional; dan
7. Bidang terkait lainnya yang disepakati oleh para pihak.¹⁰(http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/groups_en.htm. Kerja sama Indonesia dengan Thailand diakses tanggal 09 April 2014)

Untuk pencapaian kerjasama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.

Implementasi kerjasama Indonesia Dan thailand di bidang pertanian (studi ksu pengktn kulits ers thun 2010-2014)

a. Hasil kesepakatan dari kerjasm indonesia –thailand

Sesuai dengan Pasal 4 Tujuan, Joint Agriculture Working Group (JAWG) program kelompok kerjasama pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kerja pertanian bersama (JAWG) harus ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan nota kesepahaman ini.
2. JAWG dikepalai para pihak harus dari tingkat pejabat senior.
3. JAWG harus bertanggungjawab untuk menilai hasil dari program.
4. JAWG harus bertemu secara bergantian di Indonesia dan di Thailand untuk mengevaluasi, merencanakan dan melaporkan kemajuan pekerjaan kecuali para pihak menyetujui hal lain.
5. Masing-masing pihak akan menunjuk sekretaris penghubung untuk melakukan koordinasi antar lembaga dan tugas-tugas rutin JAWG tersebut.

Selain itu, kebijakan yang diambil dari MoU pasal 3 poin ke-4, hasil kerjasama kedua negara untuk program ketahanan pangan di Indonesia antara lain:

1. Pengendalian impor pangan
2. Menanggulangi kemiskinan petani dan regenerasi petani
3. Implementasi reformasi agraria Pembangunan agribisnis kerakyatan.

b. Lembaga yang Menangani Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia

salah satu hasil dari kesepakatan Indonesia dan Thailand dalam JAWG dengan cara membuat berbagai lembaga. Adapun lembaga yang menangani masalah pangan di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Lembaga Penelitian

Balai Besar Penelitian Tanaman Beras, merupakan unit Kerja ini berada di bawah: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan dengan tugas

pokok lembaga ini adalah melaksanakan penelitian tanaman beras. Fungsi dari lembaga ini antara lain:

- a. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman beras
- b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman beras
- c. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman beras
- d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman beras
- e. Penyiapan kerja sama, informasi, dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman beras
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Balai Penelitian Beras (disingkat Balitpa) adalah satu dari lembaga penelitian di bawah Balitbang Pertanian yang bertugas meneliti semua aspek pertanian tanaman beras, mulai dari biologi hingga sosial ekonomi. Balitpa merupakan lembaga induk yang juga bertugas mengkoordinasi penelitian beras di berbagai wilayah Indonesia.

2. *Lembaga Pengelola Beras*

Kementerian Pertanian sudah mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Lembaga ini berfungsi sebagai lumbung berasnya desa yang dikelola oleh para petani. Akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit bila dibanding jumlah desa di Indonesia. Selain itu, manajemen stok di setiap LDPM pun belum bagus.

3. *Lembaga Penyimpanan*

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Pada Keppres No. 29 tahun 2000, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹(Rossi Prabowo, 2007, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasim Semarang. Tidak Dipublikasikan.)

Akan tetapi, dari banyaknya peningkatan beras dengan adanya perhatian terhadap petani dan innovator dalam kemajuan teknologi pertanian, tetap saja dipandang

bahwa beras tetap terbatas jumlah produksinya. Beberapa masalah yang diperkirakan menjadi pembatas peningkatan produksi adalah:⁴

1. Keterbatasan sumberdaya lahan sebagai akibat konversi menjadi pabrik, jalan, perkantoran maupun pemukiman,
2. Pemilikan lahan yang relatif kecil-kecil sehingga sulit berproduksi secara optimal,
3. Kualitas agroekosistem yang kian miskin bahkan jenuh input; dan
4. Sebaran produksi yang sebagian besar masih bertumpu di Pulau Jawa.

Kebijakan indonesia

Pada dasarnya, Kementerian Pertanian menetapkan strategi yang dibuat untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia yaitu dengan revitalisasi pertanian dan varietas beras. yakni

1. Revitalisasi lahan,
 2. revitalisasi perbenihan dan pembibitan,
 3. revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM,
 4. revitalisasi pembiayaan pertanian,
 5. revitalisasi kelembagaan petani dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.
- Revitalisasi lahan, antara lain, diwujudkan melalui program pencetakan sawah dan lahan pertanian baru. Revitalisasi pembenihan dan pembibitan, diwujudkan melalui pengembangan riset benih dan bibit serta program bantuan benih dan bibit.

Adapun revitalisasi infrastruktur dan sarana, diwujudkan antara lain:

1. Melalui program perbaikan irigasi desa.
2. Revitalisasi sumber daya manusia, diwujudkan melalui pengembangan SDM lewat pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian.
3. Di pihak lain, revitalisasi pembiayaan petani, antara lain diwujudkan melalui program pembiayaan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Sarjana Membangun Desa (SMD). Revitalisasi kelembagaan petani, diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta pembentukan Lembaga Keuangan Mikro. Revitalisasi Pembiayaan dan Revitalisasi Kelembagaan Petani, diharapkan menjadi awal mula tumbuh kembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro di pedesaan yang kelak menjadi Bank Pertanian di desa-desa. Program revitalisasi teknologi dan industri hilir dilakukan dengan cara pengembangan dan bantuan alat mesin pertanian seperti traktor, pompa air, penggilingan gabah, alat pemerah susu, rumah potong hewan serta perangkat pengolahan kompos dan biogas. Lewat revitalisasi ini peluang bagi terciptanya kesejahteraan petani

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas Pemerintah Indonesia sebelumnya melakukan revitalisasi pertanian dan varietas beras. Melalui kerjasama dengan pemerintah thailand telah melakukan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan kualitas

beras. Contohnya, Kerjasama teknis dan bantuan untuk pembangunan kapasitas di pertanian pengembangan di pertanian indonesia

Daftar Pustaka

Jurnal dan skripsi

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 119-128 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013kerjasama united state environmental protection agency (us-epa) – Indonesia dalam peningkatankualitas udara & kesehatan publik(studi kasus program breathe easy jakarta)tazrian juniarto saputra1nim. 0702045167, hal 4).

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 119-128 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013kerjasama united state environmental protection agency (us-epa) – Indonesia dalam peningkatankualitas udara & kesehatan publik(studi kasus program breathe easy jakarta)tazrian juniarto saputra1nim. 0702045167, hal 4).

Skripsi: Hestie Dwi Mandasari, Nim 03.378737.05135.02 peluang dan kendala kerjasama bilateral indonesia-jepang dalam kerangka kerjasama economic partnership agreement (epa) halman 18-21. (Tidak Dipublikasikan)).

Buku

Lassa Jonnatan. Politik ketahanan Pangan Indonesia, 2006

Makalah dipersiapkan untuk Kongres ISEI, Mataram, 2008

Kusumohamidjoyo, 13<http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral>. Diakses 5september 2015).

Rossi Prabowo, 2007, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasim Semarang. Tidak Dipublikasikan.

Internet

<http://nuhfil.lecture.ub>

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/groups_en.htm. Kerja sama Indonesia dengan Thailanddiakses tanggal 09 April 2014